

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
(Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

NORMIYATI SALAMAH

NPM : 2022318

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : NORMIYATI SALAMAH
NPM : 2022318
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BALANGAN (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

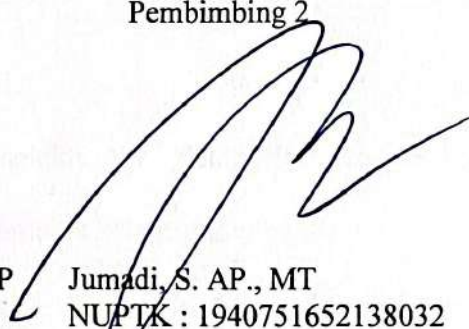
Amuntai, 08 Oktober 2025

Pembimbing 1

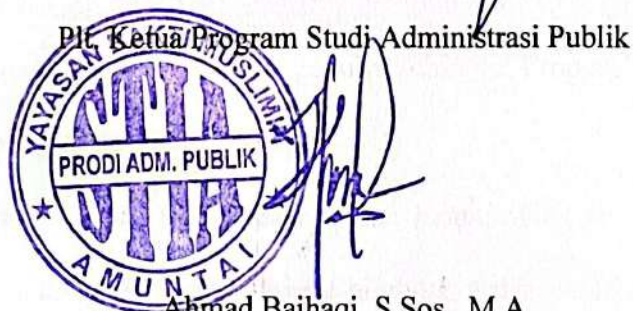


Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M.AP
NUPTK. 2742773674130272

Pembimbing 2



Jumadi, S. AP., MT
NUPTK : 1940751652138032



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul ***“IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)”***. Dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos,MA. selaku Plt Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
3. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Jumadi, S.AP, MT. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak H. Abiji, S.Pd. M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberikan informasi serta data-data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
6. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
7. Seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, terutama yang memberikan data serta informasinya kepada penulis.
8. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amuntai terima kasih atas dukungan motivasi serta doa'nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan Proposal Skripsi ini.

Amuntai, 08 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Teoritis.....	19
1. Pengertian Kebijakan	19
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	20
3. Pengertian Implementasi	23
4. Pengertian Program	24
5. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	26
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	32
7. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	37

C. Kerangka Pemikiran.....	40
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Tipe Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Desain Operasional Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Uji Kredibilitas Data	51

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Lembaga PAUD dan Guru Sekecamatan Juai.....	7
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	15
Tabel 3.1 Data Informan	45
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	47



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu tahap pendidikan yang sangat penting dalam membangun kualitas generasi penerus. PAUD dirancang untuk memberikan rangsangan pendidikan terhadap anak pada rentangan umur emas (0-6 tahun), periode yang dianggap paling menentukan perkembangan kognitif, sosial, emosional, serta karakter anak masa depan. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan landasan dalam perkembangan anak yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Dalam beberapa dekade terakhir perhatian pada PAUD telah tumbuh seiring kesadaran global pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Investasi dalam PAUD berkualitas berdampak jangka panjang terhadap perkembangan individu seperti peningkatan kecakapan sosial, keterampilan kognitif, dan kemampuan akademik. Menurut Loso Judijanto (2025: 2) menjelaskan Peran PAUD dalam meminimalisir masalah sosial dan ekonomi masa depan juga telah mendapat pengakuan dari berbagai organisasi internasional seperti UNESCO dan PBB. Sebagai bagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), PAUD diakui sebagai komponen kunci mencapai kesejahteraan sosial dan memutuskan rantai kemiskinan. PAUD berperan lebih luas dari sekadar mempersiapkan anak untuk aspek akademik. Fokus utama PAUD tidaklah sekedar pembelajaran kognitif, tapi terhadap pengembangan karakter serta

keterampilan hidup. Di usia dini anak mulai belajar cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dalam konteks keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat lebih luas. Proses ini melibatkan pembelajaran tentang nilai moralitas semisal jujur, hormat, serta tanggung jawab.

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya PAUD sebagai langkah fundamental pembangunan SDM berkualitas. Pentingnya PAUD di Indonesia tidaklah sekedar terlihat dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kesadaran masyarakat akan manfaatnya. Pengembangan PAUD di Indonesia tidaklah sekedar tergantung terhadap kebijakan pemerintah, tapi terhadap partisipasi aktif masyarakat pula dalam mendukung pendidikan anak. Upaya meningkatkan kualitas PAUD di Indonesia melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat agar terbangun generasi yang tidaklah sekedar cerdas akademik, tapi berketerampilan sosial yang baik dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat pula. PAUD menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pada usia dini, anak mulai mengembangkan dasar penting untuk kehidupan baik pada aspek kognitif, emosional, ataupun sosial.

Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini merupakan manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan berkualitas sejak usia dini. Program pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mengorganisir, mengelola, dan mengembangkan proses pendidikan bagi anak-anak usia dini. Program ini bertujuan memastikan bahwa pendidikan anak usia dini dilaksanakan secara efektif dan

efisien, sehingga dapat menyediakan layanan pendidikan berkualitas yang mendukung perkembangan optimal anak-anak dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral.

Pendidikan adalah proses atau kegiatan yang menggunakan metode tertentu agar siswa dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pola perilaku yang sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan juga dapat dipahami sebagai upaya komprehensif untuk mengembangkan kemampuan dan perilaku manusia yang mencakup seluruh pengalaman hidup. Pendidikan anak usia dini juga berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan panduan dan menjaga anak-anak usia dini yang berkualitas dalam hal pembangunan kapasitas yang diperlukan untuk pengelolaan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan

dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Standar sarana dan prasarana Pasal 31 ayat (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pada persyaratan sarana prasarana Pasal 32 ayat (1) Persyaratan sarana prasarana terdiri atas TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi: memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman), memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), dengan memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari. ayat (2) Kelompok Bermain (KB), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak, memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak, memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah

bagi guru dalam melakukan pengawasan dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. ayat (21) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. ayat (23) Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan anak usia dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya adalah Paringin. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang

ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kecamatan Juai adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Juai memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di Kecamatan Juai terdapat sejumlah lembaga PAUD yang berfungsi sebagai sarana pembinaan, pengasuhan, dan pemberian stimulasi pendidikan dasar bagi anak usia dini. Lembaga-lembaga ini hadir untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak baik dari aspek kognitif, bahasa, moral, spiritual, pembentukan sikap, kebiasaan positif, serta kemampuan bersosialisasi sehingga anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Dari sisi pemerataan layanan, keberadaan PAUD yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Juai membantu mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dengan hadirnya PAUD di lingkungan terdekat, anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa harus menempuh jarak yang jauh, sehingga dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak sejak dini. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, tercatat sebanyak 30 lembaga PAUD yang tersebar di berbagai desa dalam wilayah Kecamatan Juai. Berikut adalah lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Lembaga PAUD dan Guru Sekecamatan Juai

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Total Murid	Jumlah Kepala Sekolah /Guru	Pendidikan terakhir Guru	
					SLTA	S1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KB Al-Hikmah	Desa Sirap	18	1	-	1
2	KB Ar-Raudhah	Desa Tawahan	37	4	2	2
3	KB Cahaya	Pamurus	18	1	1	-
4	KB Harapan Kita	Desa Sumber Rezeki	20	2	-	2
5	KB Kartini	Desa Muara Ninian	23	2	-	2
6	KB Pembina Juai	JL Kenangan Lama Desa Mungkur Uyam	8	1	1	-
7	KB Pertiwi Ranting	Desa Hukai Rt. 02	32	2	1	1
8	PAUD Pergunu	Desa Lalayau Rt.05	2	3	2	1
9	PAUD Terpadu Harapan Kita	Sumber Rezeki	33	3	-	3
10	TK Al Hikmah (Terpadu)	Desa Sirap Rt.03	20	2	1	1
11	TK Ar-Raudah	Tawahan	11	3	3	-
12	TK Cahaya	Desa Pemurus Rt. 001	15	2	-	2
13	TK Darussalam	Juai	13	2	1	1
14	TK Mayang Marias	JL. Raya Marias	15	3	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	TK Mekarsari	Desa Hamarung	11	2	-	2
16	TK Miftahuddin	Desa Buntu Karau	13	3	1	2
17	TK Negeri Al Ikhlas	Desa Panimbaan	23	4	1	3
18	TK Negeri Dewi Sartika	Desa Teluk Bayur	16	2	-	2
19	TK Negeri Harapan Bangsa Juai	Desa Hamarung	46	5	1	4
20	TK Negeri Mawar Juai	Desa Galumbang	23	4	1	3
21	TK Negeri Melati	Desa Juai	22	3	-	3
22	TK Negeri Pembina Juai	Jl. Kenangan Lama RT.2 Desa Mungkur Uyam	54	8	2	6
23	TK Nurul Mukhsinin	Desa Sungai Batung	30	3	-	3
24	TK PAUD Terpadu Negeri Kartini	Desa Muara Ninian	35	6	-	6
25	TK Pelangi	Desa Lalayau RT. 01	16	4	3	1
26	TK Permata	Desa Bata	20	2	-	2
27	TK Pertiwi Buntu Karau	Desa Buntu Karau	32	4	2	2
28	TK Pertiwi Ranting	Desa Hukai Rt.01	34	4	1	3
29	TK Tunas Bangsa	Gulinggang	17	3	-	3
30	TK Tunas Harapan	Sumber Rejeki	17	1	1	-
Jumlah			674	89	26	63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, 2025

Dari tabel data di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Juai terdapat 30 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB) berjumlah 7 lembaga dengan jumlah murid 156 orang dan Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 23 lembaga dengan jumlah murid 518 orang, dengan total 674 murid dan 89 guru. Selain itu, guru dengan kualifikasi SLTA berjumlah 26 orang dan yang berpendidikan S1 berjumlah 63 orang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat beberapa fenomena masalah dalam Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diantaranya:

1. Adanya beberapa lembaga PAUD yang masih kekurangan Sarana dan Prasarana.

Beberapa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih kekurangan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, serta Alat Permainan Edukatif (APE) luar atau APE dalam. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan anak, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. *(Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti di lembaga PAUD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 2025)*

2. Adanya beberapa guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standar (minimal D4/S1).

Beberapa guru di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum memenuhi kualifikasi akademik minimal, yaitu gelar D4 atau S1. Hal ini berdampak pada keterbatasan kompetensi guru dalam

memahami tahap perkembangan anak, merancang rencana pembelajaran, dan menerapkan metode yang sesuai. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan anak usia dini belum terlaksana secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. *(Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti di lembaga PAUD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 2025)*

3. Masih terdapat adanya orang tua yang menganggap Kelompok Bermain (KB) itu tidak penting, sehingga orang tua langsung menyekolahkan anak ke Taman Kanak-Kanak (TK) tanpa melalui Kelompok Bermain (KB).

Beberapa orang tua masih beranggapan bahwa anak-anak dapat langsung masuk ke Taman Kanak-Kanak (TK) tanpa mengikuti Kelompok Bermain (KB). Pandangan ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang peran penting Kelompok Bermain sebagai landasan bagi perkembangan anak. Kurangnya kesadaran di kalangan orang tua ini telah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak ke Kelompok Bermain yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesiapan anak baik secara akademik maupun non akademik. *(Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti di lembaga PAUD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 2025)*

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini diarahkan pada teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61):

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antarorganisasi
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan Kemampuan agen pelaksana

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisannya ini merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai).

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya implementasi program pengelolaan pendidikan anak usia dini yang secara efektif dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sebagai acuan bagi pengelola pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan program secara lebih terorganisir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Indrati, dkk (2024) Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan judul “Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya lembaga yang belum mengimplementasikan program PAUD HI di satuan PAUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan esensial, keterlibatan orang tua, tantangan dan kendala, evaluasi serta dampak implementasi program PAUD HI di Satuan PAUD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif diskriptif serta menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan studi kasus di beberapa lembaga PAUD yang menerapkan program tersebut. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) menekankan pemenuhan kebutuhan esensial anak (Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan, Layanan Pengasuhan, Layanan Perlindungan, Layanan Kesejahteraan dan Keterlibatan Orang Tua). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan anak usia dini holistik integratif yang dilaksanakan di TK ABA Wates, TK ABA Wonokriyo dan TK Muslimat dapat memenuhi kebutuhan esensial pada anak, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dalam menjalankan program sekolah, implementasi PAUD HI juga berdampak pada perkembangan anak, kualitas lembaga dan peran orang tua, namun, masih

terdapat tantangan dan kendala yaitu keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi pendidik, sekolah juga masih perlu melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas program PA PAUD HI. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pada pentingnya pemahaman, integritas, dan manajemen, yang baik serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk memastikan keberhasilan program pengembangan anak usia dini.

2. Eliza Rahmah Prahestiwi (2020) Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul “Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alam Jomin Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan, serta faktor penghambat dan pendukung PAUD Alam Jomin dengan pendekatan kualitatif diskriptif sehingga memperoleh kesimpulan antara lain pembuatan rancangan pengelolaan, faktor penghambat dan pendukung, hasil pengelolaan PAUD Alam Jomin serta menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowbaal* serta menggunakan manajemen/pengelolaan PAUD dan konsep Sekolah Alam. Hal ini terlihat pada, pertama sistem pengelolaannya sudah cukup baik dalam hal kualitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kedua, Faktor Penghambat yang dialami dalam pengelolaan PAUD ini antara lain: kurang lengkapnya sarana dan prasarana, dan kurangnya jumlah pendidik untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Faktor Pendukung yang dialami dalam pengelolaan PAUD tersebut ialah menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Memiliki kurikulum berbasis sekolah alam dan kurikulum pemerintah, menanamkan ilmu agama islam (seperti

membiasakan setiap pagi melakukan sholat dhuha, membaca tahsin tahfiz), pendidikan dan tenaga pendidikannya berusia muda muda, terdapat pembelajaran *outbond* dan *gradening*, serta tidak mengutamakan sistem Calistung (Membaca, Menulis, dan Berhitung). Ketiga, Hasil pengelolaan PAUD alam Jomin ialah diharapkan untuk meningkatkan kualitas lembaga PAUD Alam Jomin terutama dari segi sarana dan prasarana, memperbanyak jumlah pendidik untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun pada penelitian ini lebih mengarah Implementasi Program pada Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, selain itu keterbaruan Judul penulisan, teori yang digunakan, dan tahun yang berbeda, untuk lebih jelasnya berikut pada tabel perbandingan penelitian di bawah ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
(1)	(2)	(3)
1	Indrati, dkk (2024) Judul: Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD	Normiyati Salamah (2025) Judul: Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai)

(1)	(2)	(3)
	Teori: Menekankan pemenuhan kebutuhan esensial anak Layanan Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Perawatan, Pengasuhan, Perlindungan, Kesejahteraan dan Keterlibatan Orang Tua Metode Penelitian: Kualitatif Diskriptif Teknik Penentuan Informan: <i>Purposive Sampling</i> Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilaksanakan di TK ABA Wates, TK ABA Wonokriyo dan TK Muslimat dapat memenuhi kebutuhan esensial pada anak, meningkatkan kerjasama dengan orangtua dalam menjalankan program sekolah, implementasi PAUD HI juga berdampak pada perkembangan anak, kualitas lembaga dan peran orang tua, namun, masih terdapat tantangan dan kendala yaitu keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi	Teori: Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61) Metode Penelitian: Kualitatif Diskriptif Teknik Penentuan Informan: <i>Purposive Sampling</i> Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan pada PAUD Sekecamatan Juai cukup baik terlihat pada: indikator kendala sumber daya, sosio kultural, tersedianya infrastruktur fisik yang cukup dan pendapatan yang cukup untuk pengeluaran. Adapun yang sudah baik dapat di lihat pada: indikator standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi & evaluasi, efektivitas jejaring untuk mendukung program, dukungan pemimpin politik pusat, kualitas pemimpin instansi -

(1)	(2)	(3)
	pendidik, sekolah juga masih perlu melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektifitas program PA PAUD HI.	yang bersangkutan dan komitmen petugas terhadap program. Faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor pendorong implementasi adalah kejelasan kebijakan, kepemimpinan, dan prosedur kerja, komunikasi, kerja sama, dan komitmen pelaksana serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Faktor penghambat implementasi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya pendukung serta faktor sosial dan pemahaman orang tua.
2	Eliza Rahmah Prahestiwi (2020) Judul: Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alam Jomin Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Teori: Manajemen/Pengelolaan PAUD dan konsep Sekolah Alam Metode Penelitian: Kualitatif Diskriptif	Normiyati Salamah (2025) Judul: Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai) Teori: Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61) Metode Penelitian: Kualitatif Diskriptif

(1)	(2)	(3)
	Teknik Penentuan Informan: <i>Purposive Sampling</i> dan <i>Snowbaal</i> Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama sistem pengelolaannya sudah cukup baik dalam hal kualitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kedua, Faktor Penghambat yang dialami dalam pengelolaan PAUD ini antara lain: kurang lengkapnya sarana dan prasarana, dan kurangnya jumlah pendidik untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Faktor Pendukung yang dialami dalam pengelolaan PAUD tersebut ialah menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memiliki kurikulum berbasis sekolah alam dan kurikulum pemerintah, menanamkan ilmu agama islam (seperti membiasakan setiap pagi melakukan sholat dhuha, membaca tahsin tahfiz), pendidikan dan tenaga pendidikannya berusia muda-muda, terdapat pembelajaran <i>outbond</i>, <i>gradening</i>, serta tidak -	Teknik Penentuan Informan: <i>Purposive Sampling</i> Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan pada PAUD Sekecamatan Juai cukup baik terlihat pada: indikator kendala sumber daya, sosio kultural, tersedianya infrastruktur fisik yang cukup dan pendapatan yang cukup untuk pengeluaran. Adapun yang sudah baik dapat di lihat pada: indikator standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi & evaluasi, efektivitas jejaring untuk mendukung program, dukungan pemimpin politik pusat, kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan dan komitmen petugas terhadap program. Faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor pendorong implementasi adalah kejelasan kebijakan, kepemimpinan, dan prosedur kerja, komunikasi, kerja sama, dan komitmen pelaksana serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Faktor penghambat

(1)	(2)	(3)
	mengutamakan sistem Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung). Ketiga, Hasil pengelolaan PAUD Alam Jomin ialah diharapkan untuk meningkatkan kualitas lembaga PAUD Alam Jomin terutama dari segi sarana dan prasarana, memperbanyak jumlah pendidik untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).	implementasi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya pendukung serta faktor sosial dan pemahaman orang tua.

Sumber: Dibuat Peneliti, 2025

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Kebijakan adalah pedoman konsisten untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan.

Menurut pendapat Eulau & Prewitt dalam Leo Agustino, Ph.D. (2022: 15-16) Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka

yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Menurut Carl J Frederick sebagaimana dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 1) mendefinisikan kebijakan adalah Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Keban dalam Yulianto Kadji (2015: 5) menjelaskan bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Menurut Robert Eyestone dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut

Nugroho dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan *“tindakan”* dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Adapun menurut Arafat (2023: 1) kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4-5) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 5) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the authoritative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster *Dictionary* dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016: 153-155), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa kesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Menurut Gordon dalam Deddy Mulyadi (2016: 24), menjelaskan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Sedangkan Menurut Joko Pramono (2020: 1) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Menurut Jumroh (2021: 1) konsep implementasi juga berkaitan dengan pencapaian tujuan yang lebih

luas dan lebih besar sebagai bagian dari pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi bermuara kepada terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Pengertian Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian. Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya berwenang untuk mencapai tujuan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus terpenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaanya (eksekutif).

Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya

mencapai tujuan dari program itu sendiri. Salah satu model implementasi program, yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (Akib & Tarigan, 2008). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.

Menurut Korten dalam Akib & Tarigan (2008: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status)

menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

a. Model Donald van Metter & Carl van Horn

Menurut van Metter & van Horn dalam Leo Agustino, Ph.D. (2022: 151-153), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan tujuannya dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik pada titik yang dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah. Untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu pun dapat menjadi penyebab ketat, maka hal ini ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksanananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Leo Agustino, Ph.D. (2022: 154-158) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa

yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan.

3) Disposisi

Ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

4) Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur

birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

c. Model Thomas R. Dye

Model Thomas R. Dye dalam Leo Agustino, Ph.D. (2022: 168), model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Tahap implementasi program dianalisis dan dievaluasi sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan diketahui dan segera diperbaiki.

d. Model Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Model Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61) menjelaskan terdapat empat kelompok variabel yang

dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu:

- 1) Kondisi Lingkungan
- 2) Hubungan Antarorganisasi
- 3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

e. Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier dalam Leo Agustino, Ph.D. (2022: 163) adalah model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Sahya Anggara 2018: 257-261) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Karakteristik Masalah

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan,

pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan.

- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

b. Karakteristik Kebijakan

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan yang nyata.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan Kebijakan

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan juga dapat diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

3) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain:

a) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan.

b) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat suatu pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.

4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Dalam model ini Mazmanian dan Sabatier memandang implementasi kebijakan dari kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan permasalahan yang dihadapi serta kondisi lingkungan yang ikut mempengaruhi sebuah pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry dalam Deddy Mulyadi (2016: 27):

- a) *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
- b) *Money (Finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
- c) *Material (Logistik)*.
- d) *Machine (Information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang terbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.

- e) *Methods (Legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk partisipasi: *pertama* murni yang muncul secara spontan dari rakyat, *kedua* mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

7. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Pengertian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut D. Sudjana (2010: 17) Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan, bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut pendapat Hersey dan Blanchard dalam D. Sudjana (2010: 17) bahwa “*Management as working with and through individuals and group to accomplish organizational goals*” yang diartikan pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud mencapai tujuan organisasi. Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan dapat bekerjasama dalam mengelola Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dikatakan bahwa manajemen program pendidikan merupakan upaya menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan setiap program.

Menurut George R. Terry (2009: 9), mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan di pahami sebagai suatu proses perencanaan, membedakan atas pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen sering dikaitkan dengan suatu aktivitas-aktivitas dalam organisasi.

Menurut pendapat Bambang Hartoyo dalam Muhammad Fadlillah (2014: 72), mendeskripsikan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai berikut:

- 1) Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak.
- 2) Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, emosi, dan spiritual), sosio emosional (sikap perilaku dan agama), bahasa dan komunikasi.
- 3) Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan PAUD disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

b. Program Dari Pemerintah

Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani pada anak usia dini.

Menurut Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 bahwa pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pendidikan Anak usia dini adalah membangun suatu landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya. Program ini diharapkan mampu menyediakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensi berpikir, sosial, fisik, dan emosional secara optimal. Dengan demikian diperlukan adanya Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai implementasi kebijakan dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari peneliti sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2022: 95), Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Kerangka Pemikiran ini Sesuai dengan judul Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program yang dirancang secara terstruktur untuk membangun fondasi penting bagi perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan moral anak sejak usia dini, melalui kegiatan bermain yang edukatif dan sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini masih ditemukan kondisi dimana adanya beberapa lembaga PAUD yang masih kekurangan sarana dan prasarana, adanya beberapa guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standar (minimal D4/S1) dan masih terdapat adanya orang tua yang menganggap Kelompok Bermain (KB) itu tidak penting, sehingga orang tua langsung menyekolahkan anak ke Taman Kanak-Kanak (TK) tanpa melalui Kelompok Bermain (KB). Dalam menjawab permasalahan tersebut

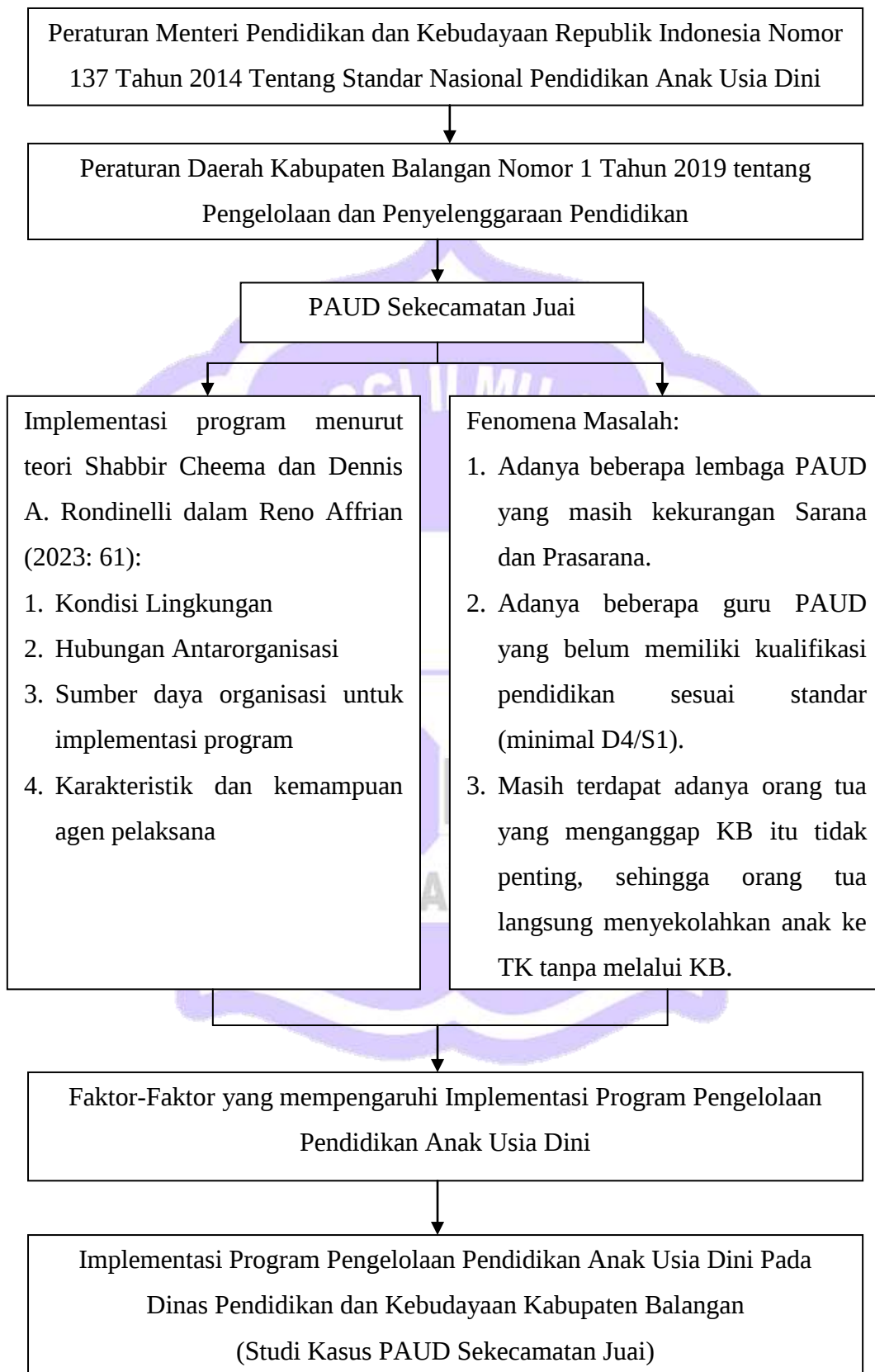
dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (21) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai) maka peneliti mengambil teori Implementasi program menurut Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61):

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antarorganisasi
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan Kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan memberikan gambar terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, yang menjadi objek penelitian adalah PAUD Sekecamatan Juai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan mengamati dan mengumpulkan data melalui suatu metode yang dapat menghasilkan data deskriptif untuk menjelaskan berbagai proses yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menguraikan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Sugiyono (2023: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih merinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari dengan maksimal seseorang atau individu maupun kelompok dalam suatu peristiwa tertentu.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat di peroleh langsung dari sumber asli atau objek penelitian tanpa perantara. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak dapat di peroleh langsung dari pengumpul data, tetapi melalui perantara orang lain. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti. Data sekunder ini untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No	Informan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1 Orang
3.	Pengawas PAUD	1 Orang
4.	Kepala sekolah KB Pertiwi Ranting	1 Orang
5.	Masyarakat KB Pertiwi Ranting	1 Orang

(1)	(2)	(3)
6.	Kepala Sekolah KB Ar-Raudhah	1 Orang
7.	Masyarakat KB Ar-Raudhah	1 Orang
8.	Kepala Sekolah TK Al Hikmah (Terpadu)	1 Orang
9.	Masyarakat TK Al Hikmah (Terpadu)	1 Orang
10.	Kepala Sekolah TK Pertiwi Buntu Karau	1 Orang
11.	Masyarakat TK Pertiwi Buntu Karau	1 Orang
12.	Kepala Sekolah TK Pelangi	1 Orang
13.	Masyarakat TK Pelangi	1 Orang
14.	Kepala Sekolah TK Miftahuddin	1 Orang
15.	Masyarakat TK Miftahuddin	1 Orang
Jumlah		15 Orang

Dibuat: Peneliti, 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Penelitian ini mengenai Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (Studi Kasus PAUD Sekecamatan Juai).

Berikut ini penulis sajikan desain operasional penelitian yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup Variabel	Indikator
Implementasi program menurut teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Reno Affrian (2023: 61)	Kondisi Lingkungan	1. Kendala sumber daya 2. Sosio Kultural 3. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
	Hubungan Antarorganisasi	1. Standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi & evaluasi 2. Efektivitas jejaring untuk mendukung program
	Sumber daya organisasi untuk implementasi program	1. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran 2. Dukungan pemimpin politik pusat
	Karakteristik dan Kemampuan agen pelaksana	1. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan 2. Komitmen petugas terhadap program

Dibuat: Peneliti, 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut Bungin dalam

Djaman Satori dan Aan komariah (2014: 61) Observasi adalah metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2023: 114) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Kartono dalam Imam Gunawan (2015: 160) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai (*interviewer*), sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplyer*), *interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen, data berupa dokumentasi foto-foto saat pada proses dilakukan wawancara dan foto-foto lainnya sebagai pendukung dari hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2018: 476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan mengorganisasikan data yang dapat dikelola. Menurut Sugiyono (2017: 131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis Data menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023: 132) terdapat 4 langkah dalam analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Date Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang

diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (*Date Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data (*Date Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2023: 137) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2023: 141-142) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023: 186-194) Pengujian Kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, dan *Member Check*. Pada penelitian ini, cara peneliti menguji kredibilitas hasil penelitian dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam penelitian ini Peneliti meningkatkan ketekunan secara lebih mendalam lagi untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari pihak terkait benar adanya serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini benar-benar didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh dari sumber yang relevan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

3. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin lebih kredibel atau dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Anonim. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 *Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Anonim. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Akib, dkk. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi kedua. Bandung: Alfabeta, cv.
- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Arafat. 2023. *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*, Edisi Pertama. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Dewi Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis kebijakan*, Edisi Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadlillah, Muhammad. 2014. *Desain Pembelajaran PAUD Tinjauan Teoretik & Praktik*, Edisi Kedua. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indrati, dkk. 2024. *Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 19 No. 2.
- Jumroh. *Et al.* 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*, Edisi Pertama. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Judijanto, Loso. *Et al.* 2025. *Pendidikan Anak Usia Dini*, Edisi Pertama. Malang: CV. Future Science.

- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Edisi Pertama. Gorontalo: UNG Press Gorontalo Anggota Ikapi.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prahestiwi, Rahmah Eliza. 2020. *Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alam Jomin Kecamatan Kotabaru*. Journal Of Adult and Community Education. Vol. 2 No. 1.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Edisi Pertama. Surakarta: Unisri Press.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Rantung, Riisyie Inof Margareth. 2024. *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*, Edisi Pertama. Tondano: Tahta Media Group.
- Sudjana, D. 2010. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Satori, Djam'an. *Et al.* 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta, CV.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Akera.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.